



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.34/ 196 /Distanhortbun-PSP/2020

TENTANG

REALOKASI KELIMA DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PADA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 521.4/8954/BSP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 521.4/6534/BSP/2020 Tentang perubahan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Realokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat TA.2020;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Pasal 11 ayat 2 dan 3 huruf b;
 - c. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Realokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5433);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Perindustrian 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (/Berita Negara 2013 Nomor 1055);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Realokasi Kelima Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Menurut Jenis Pupuk pada Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Realokasi Kelima Per Jenis Pupuk bersubsidi dan Sebaran Per Bulan untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, seperti tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Harga Eceran Teringgi (HET) dan kemasan Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2020, seperti tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN. N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kabag Perek Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. PT. Petrokimia Gresik di Padang
5. PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Padang
6. Distributor PT. Petrokimia Gresik Wilayah Kab. Pesisir Selatan
7. Distributor PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) wilayah Kab. Pesisir Selatan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.34/ 196 /Distanhortbun-PSP/2020
 Tanggal : 12 Oktober 2020
 Tentang : Realokasi Kelima dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

REALOKASI KELIMA PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020
 MENURUT JENIS PUPUK PADA KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KECAMATAN	REALOKASI IV PER JENIS PUPUK (TON)						REALOKASI V PER JENIS PUPUK (TON)						
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	50			
1	2													
1	Koto XI Tarusan	458.00	115.00	153.00	529.00	398.00		458.00	136.54	135.00	529.00		123.00	
2	Bayang	320.00	193.00	204.00	491.00	441.00		320.00	186.19	178.00	491.00		121.00	
3	IV Nagari Bayang Utara	200.00	66.30	85.00	315.00	351.00		240.00	71.30	85.00	315.00		102.00	
4	IV Jurai	200.00	182.83	258.00	435.00	355.00		220.00	121.35	173.00	435.00		121.00	
5	Batang Kapas	223.00	124.67	187.00	529.00	396.00		223.00	146.49	182.00	529.00		135.00	
6	Sutera	650.00	184.00	219.00	519.00	445.00		298.00	180.32	169.00	476.00		173.50	
7	Lengayang	430.00	206.00	223.00	609.00	447.00		440.00	297.35	250.00	609.00		155.63	
8	Ranah Pesisir	454.00	248.00	250.00	680.00	440.00		474.00	332.00	273.00	730.00		159.83	
9	Linggo Sari Baganti	671.00	154.00	226.00	559.00	359.00		313.00	171.95	221.00	559.00		159.67	
10	Pancung Soal	590.00	144.00	192.00	533.00	325.00		890.00	176.22	223.00	533.00		125.23	
11	Air Pura	590.00	124.64	185.00	542.00	360.00		900.00	143.80	175.00	542.00		148.70	
12	Basa Ampek Balai Tapan	491.00	96.76	158.00	483.00	399.00		491.00	127.97	158.00	483.00		152.74	
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	290.00	58.67	127.00	452.00	367.00		290.00	65.09	117.00	302.00		146.50	
14	Lunang	592.00	126.00	97.00	338.00	321.00		637.00	181.07	101.00	488.00		132.40	
15	Silaut	200.00	64.13	86.00	318.00	304.00		265.00	98.36	86.00	318.00		143.80	
	TOTAL	6,359.00	2,088.00	2,650.00	7,332.00	5,708.00		6,459.00	2,436.00	2,526.00	7,339.00		2,100.00	

KEPALA DINAS

Ir. NUZIKWAN. N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001